



LAPORAN KINERJA

BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN

TAHUN

2020

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Kelembagaan	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Dukungan SDM	4
E. Bagan Organisasi	8
F. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis.....	10
1. Visi.....	10
2. Misi.....	11
3. Tujuan	12
4. Sasaran	13
B. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Pengukuran Kinerja	17
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	20
C. Realisasi Anggaran	39
BAB IV PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai di Lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan	4
Tabel 2	Sasaran Program 1.....	14
Tabel 3	Sasaran Program 2.....	14
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2020 Satker Dewan	16
Tabel 5	Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2020 Satker Setjen	16
Tabel 6	Anggaran Satker Setjen	17
Tabel 7	Capaian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2020.....	19
Tabel 8	Capaian Kinerja Tim Pemantau DPR RI	23
Tabel 9	Capaian Kinerja Tim Implementasi Reformasi DPR RI	25
Tabel 10	Capaian Kinerja Tim <i>Open Parliament Indonesia</i>	26
Tabel 11	Capaian Kinerja Tim Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia DPR RI	26
Tabel 12	Capaian Pelaksanaan Rapat di lingkungan Pimpinan	28
Tabel 13	Indikator Kinerja Sasaran/Program Kegiatan Tersedianya Dokumen Materi Persidangan Pimpinan	29
Tabel 14	Capaian Kinerja Rapat-rapat Badan Musyawarah	30
Tabel 15	Capaian Kinerja Rapat-rapat Musyawarah Pimpinan	32
Tabel 16	Capaian Kinerja Kegiatan Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal	33
Tabel 17	Rincian Kegiatan Bagian TU Tenaga Ahli	34
Tabel 18	Laporan Administrasi Tenaga Ahli, Staf Administrasi, dan Laporan Administrasi Pegawai Tidak Tetap.....	35
Tabel 19	Capaian kegiatan yang dilaksanakan Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi DPR	36
Tabel 20	Nilai Indeks Kepuasan Pimpinan DPR RI atas Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan	37
Tabel 21	Capaian Kegiatan Pelaksanaan Tugas Ketua DPR RI	38
Tabel 22	Perubahan Alokasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2020 dan realisasinya	40
Tabel 23	Capaian Realisasi Anggaran Program Penguatan Kelembagaan DPR RI (Satker Dewan)	41
Tabel 24	Capaian Realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI (Satker Setjen).....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Data Pegawai Di Lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan	5
Gambar 2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan	6
Gambar 3	Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan	7
Gambar 4	Jumlah Pegawai berdasarkan Usia	7
Gambar 5	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	8
Gambar 6	Organisasi Biro Kesekretariatan Pimpinan	8
Gambar 7	Program Berdasarkan Satuan Kerja (Satker).....	19
Gambar 8	Capaian Kinerja Kegiatan Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan salah satu lembaga kesekretariatan lembaga negara sebagai sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Berdasarkan Peraturan Presiden No. 26 tahun 2020 Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dibantu oleh 2 (dua) Deputi, satu Kepala Badan, dan satu unsur pengawasan internal yaitu Inspektorat Utama.

Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah salah satu unit eselon II yang berada di bawah Deputi Bidang Persidangan, yang secara umum memiliki tugas dan fungsi melakukan dukungan dan pelayanan terhadap Pimpinan DPR RI. Sebagai bagian dari Setjen, Biro Kesekretariatan Pimpinan merupakan unsur penting di dalam menunjang kinerja Pimpinan DPR RI. Sebagai aparatur pemerintahan, Biro Kesekretariatan Pimpinan dituntut melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana instansi pemerintahan lainnya. Artinya bahwa jajaran Biro Kesekretariatan Pimpinan harus dapat akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, telah diatur di dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil dan merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel yang efisien, efektif, transparan dan responsif

terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Sebagai suatu sistem, SAKIP merupakan satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yaitu: Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Dalam rangkaian kesatuan tersebut, sebuah pelaporan kinerja akan mengungkapkan seberapa jauh capaian yang diraih sebuah organisasi. Sebuah laporan kinerja dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam kerangka itulah, penyusunan Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini merupakan sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Biro Kesekretariatan Pimpinan yang diamanahkan selama kurun waktu 1 tahun yang memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan pada masa yang akan datang.

B. KELEMBAGAAN

Sekretariat Jenderal DPR RI diatur berdasarkan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2020, untuk Biro Kesekretariatan Pimpinan memiliki tugas pokok menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta dukungan persidangan Badan Musyawarah. Adapun kelembagaan Biro Kesekretariatan Pimpinan diatur berdasarkan Peraturan Sekretaris

Jenderal DPR RI, terakhir diubah melalui Persekjen Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Biro Kesekretariatan Pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Persidangan.

Fungsi yang melekat pada Biro Kesekretariatan Pimpinan	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis Biro Kesekretariatan Pimpinan;
	Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja Tahunan Biro Kesekretariatan Pimpinan;
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan;
	Koordinasi dan Pembinaan terhadap Pelaksanaan Tugas Unit Organisasi di Lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan;
	Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Dukungan Kesekretariatan Pimpinan;
	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Dukungan Kesekretariatan Pimpinan;
	Pelaksanaan Kegiatan Kesekretariatan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
	Pelaksanaan Dukungan Rapat dan Tata Usaha Badan Musyawarah dan Tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
	Pelaksanaan Kegiatan Tata Usaha kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal;
	Pelaksanaan Kegiatan Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
	Pelaksanaan Dukungan Administrasi Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia;
	Pelaksanaan Kegiatan Lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Persidangan;
	Penyusunan Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan; dan
	Pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal, dukungan persidangan terhadap Rapat Pimpinan, Badan Musyawarah dan Tim DPR RI serta tata usaha tenaga ahli dan staf administrasi anggota DPR RI, yang dikepalai oleh

seorang Kepala Biro. Adapun unit-unit kerja yang berada di bawah Biro Kesekretariatan Pimpinan, sebagai berikut:

1. Bagian Sekretariat Ketua; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
2. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
3. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
4. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
5. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
6. Bagian Sekretariat Badan Musyawarah; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
7. Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
8. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 3 (tiga) Kasubag.
9. Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.

D. DUKUNGAN SDM

Keseluruhan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan berjumlah 104 (seratus empat) orang, tersebar di 9 (sembilan) Bagian.

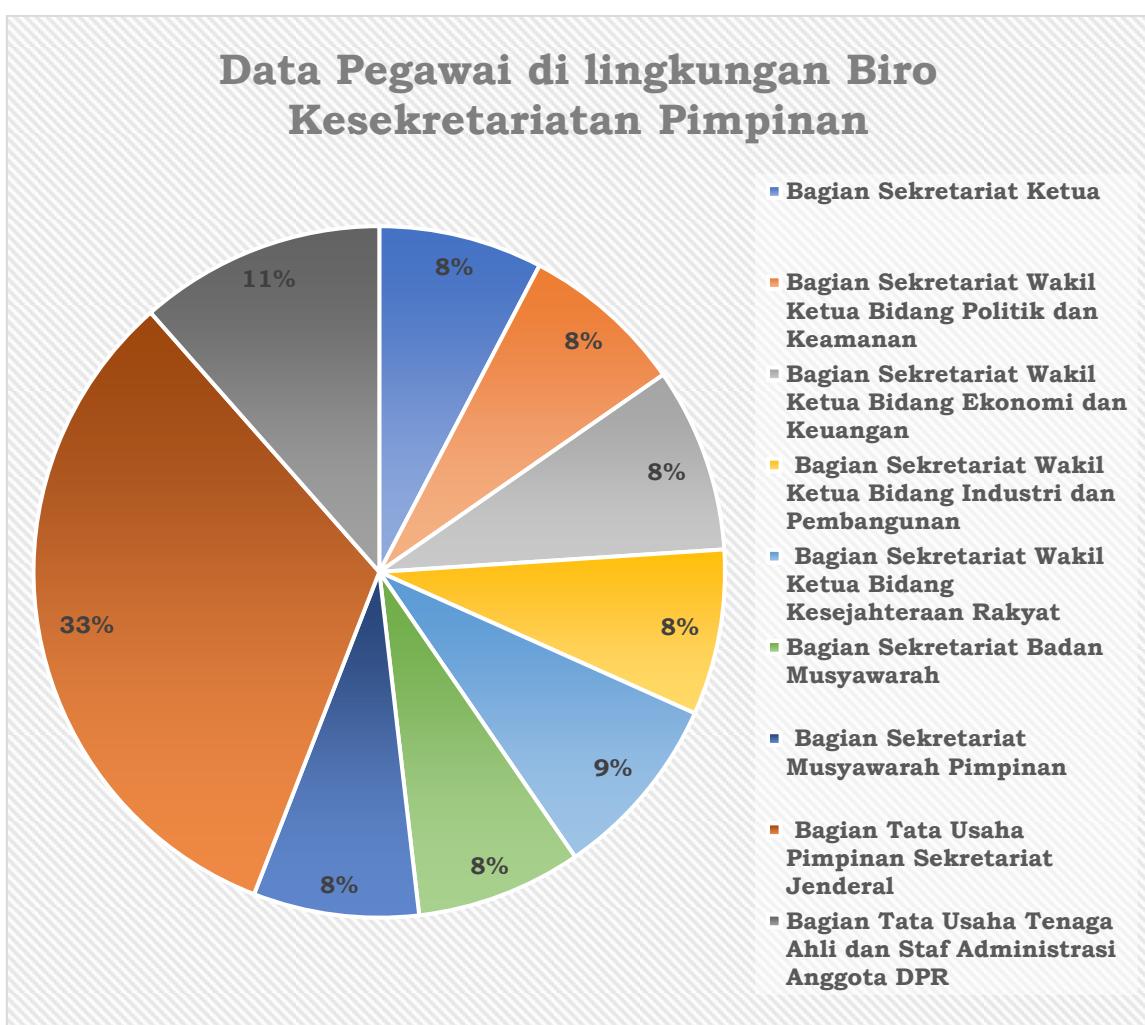
Tabel 1
Jumlah Pegawai di Lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan

JABATAN/BAGIAN	%	JUMLAH
Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan	1,0	1
Bagian Sekretariat Ketua	7,7	8
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan	7,7	8

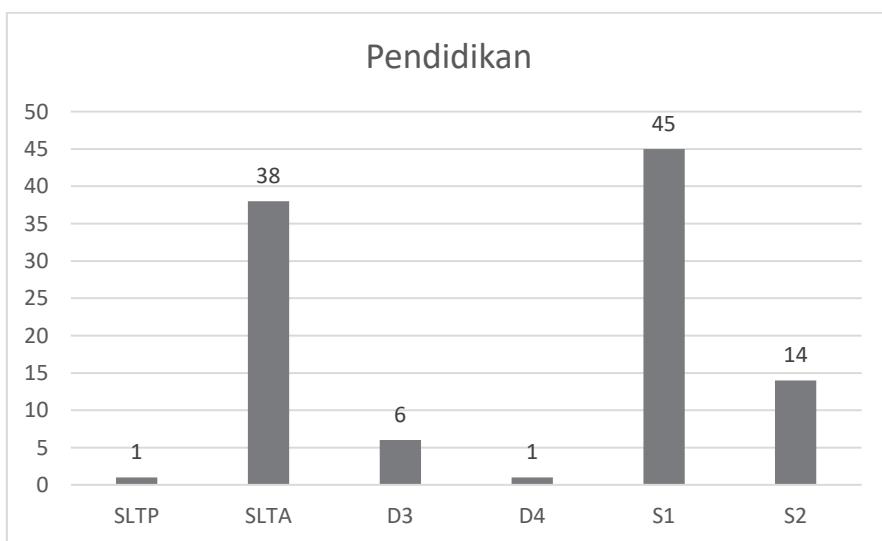
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan	8,7	9
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan	7,8	8
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	8,7	9
Bagian Sekretariat Badan Musyawarah	7,8	8
Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan	7,8	8
Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal	32,7	33
Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR	11,5	12
Jumlah Pegawai di lingkungan Biro Pimpinan		104

Gambar 1
Data Pegawai Di Lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan

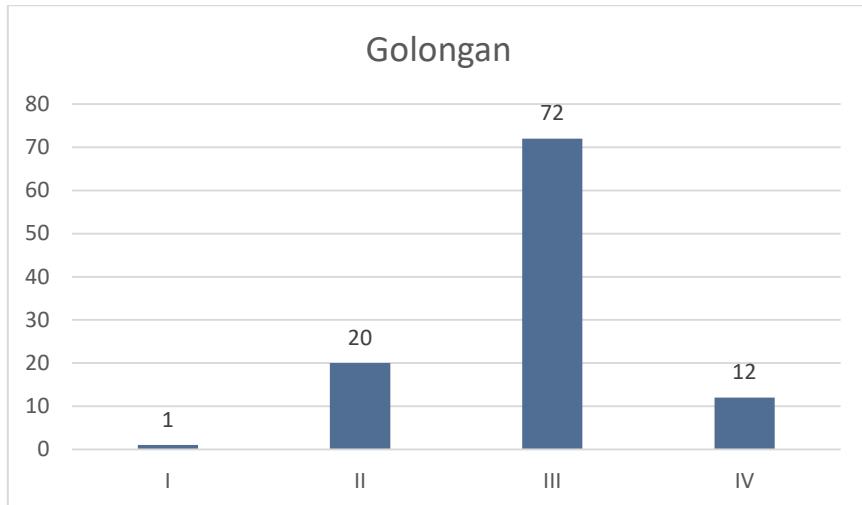
Data Pegawai di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan



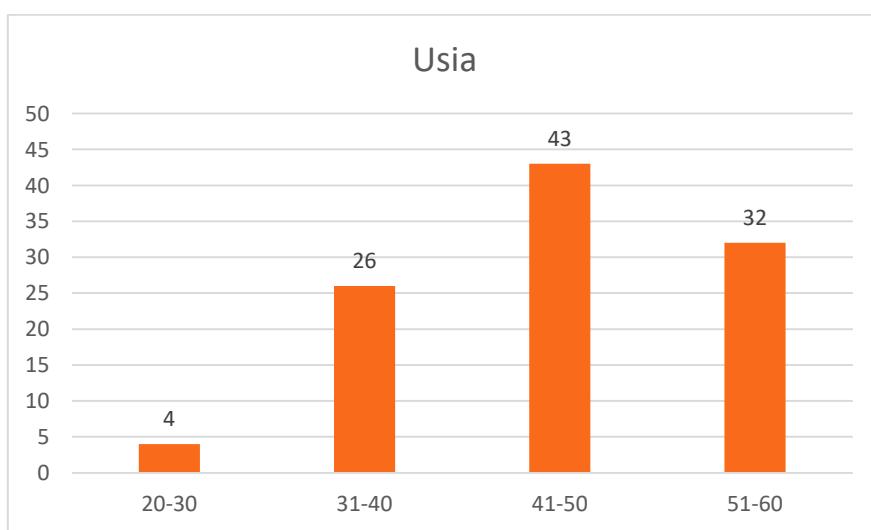
Gambar 2
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan



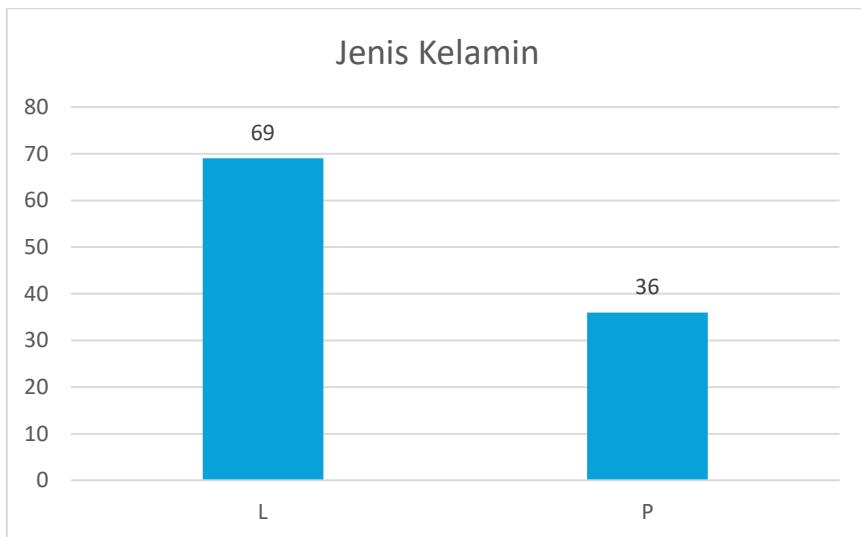
Gambar 3
Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan



Gambar 4
Jumlah Pegawai berdasarkan Usia



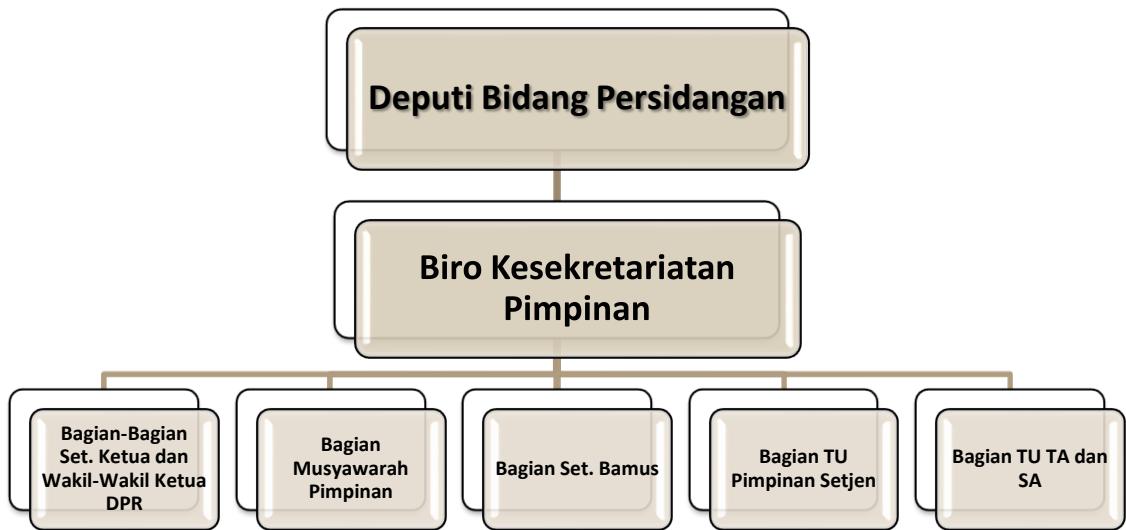
Gambar 5
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



E. BAGAN ORGANISASI

Struktur Organisasi Biro Kesekretariatan Pimpinan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016.

Gambar 6
Organisasi Biro Kesekretariatan Pimpinan



F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi yang memadai tentang akuntabilitas kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan selama tahun 2020. Penyusunan Laporan ini dengan cara membandingkan capaian kinerja (*performance result*) 2020 dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Penyajian pelaporan capaian kinerja merupakan realisasi keseluruhan kegiatan selama 1 (satu) tahun sedangkan rencana kinerja adalah hal-hal yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Selanjutnya, akan dikemukakan juga analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja, yang akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, maka sistematika penyajian laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum, kedudukan, tugas dan fungsi, peran strategis, struktur organisasi Biro Kesekretariatan Pimpinan, dukungan SDM dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan mengenai Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja yaitu sasaran yang akan dicapai pada tahun 2020 dalam rangka pencapaian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan analisis akuntabilitas kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2020.

BAB IV PENUTUP

Bab ini mengungkapkan secara umum tentang keberhasilan, permasalahan dan kendala utama berkaitan dengan kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan serta rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, setiap instansi pemerintah harus berupaya mengimplementasikan SAKIP. Substansi dari SAKIP adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Strategis dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja tiap tahunnya.

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian dukungan terhadap 3 fungsi DPR (legislasi, anggaran, pengawasan), program kerja Biro Kesekretariatan Pimpinan mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2019-2024 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

1. Visi

Biro Kesekretariatan Pimpinan tidak merumuskan visi dan misi sendiri, karena visi dan misi ada pada satu lembaga, yaitu visi dan misi Sekretariat Jenderal, dan organisasi dibawahnya menjalankan program-program yang dituangkan dalam visi tersebut. Sesuai dengan kedudukannya visi Sekretariat Jenderal DPR R yang dirumuskan dan diturunkan melalui program kerja Deputi Bidang Persidangan akan menjadi pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan pelaksanaan tugas Biro Kesekretariatan Pimpinan. Oleh karena itu apa yang akan dicapai oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan dalam lima tahun ke depan harus selaras dengan program Deputi Bidang Persidangan.

Adapun visi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yaitu:

“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”

Profesional artinya Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan modern berarti memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Sekretariat Jenderal DPR RI yang didukung oleh Deputi Bidang Persidangan untuk menjadikan jajarannya berkinerja lebih tinggi melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

Atas dasar hal tersebut melalui Deputi Bidang Persidangan, Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan fokus pada tupoksi yang telah ditetapkan, yaitu menyelenggarakan dukungan Kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, Dukungan Persidangan kepada Badan Musyawarah dan Tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan sehingga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Misi

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 2) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 3) Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, Biro Kesekretariatan Pimpinan mengacu dan berpegang teguh pada Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI tersebut dan berupaya untuk :

- a. Meningkatkan kualitas dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan Pimpinan Dewan;
- b. Meningkatkan kualitas dukungan kegiatan Rapat Pimpinan, Rapat/Pertemuan Konsultasi, Rapat Koordinasi, dan Rapat Bamus yang optimal; dan
- c. Meningkatkan kualitas dukungan tata usaha, rapat-rapat dan kerumahtanggaan Pimpinan Sekretariat Jenderal.

3. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, sesuai dengan tujuan Deputi Bidang Persidangan menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

- 1) Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi yang tepat, cepat, dan akurat yang dibutuhkan oleh DPR RI;
- 2) terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih;
- 3) terwujudnya dukungan keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik.

4. Sasaran

Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu Program. Oleh karena itu sasaran Biro Kesekretariatan Pimpinan sesuai dengan program Deputi Bidang Persidangan, diantaranya:

- Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tidak lepas dari dukungan Deputi Bidang Pesidangan.

Tabel 2
Sasaran Program 1

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,20	3,22	3,24	3,26	3,28

- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas

Tabel 3
Sasaran Program 2

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR	1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	AA
	2. Hasil Evaluasi	B	B	A	A	A

RI yang berkualitas	Akuntabilitas Kinerja					
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	4. Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	5. Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	2	4	6	8	10
	7. Jumlah program diklat dengan hasil akreditasi minimal “B”	2	1	1	2	1
	8. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	B	BB	A	A	A

B. PERJANJIAN KINERJA

Biro Kesekretariatan Pimpinan telah memiliki dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2020.

Tabel 4

Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2020 Satker Dewan

SATKER/PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	
Satker: Dewan		Rp.84.369.524.000,-	
Program/Kegiatan: 1. Pelaksanaan Fungsi DPR RI Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI		Rp.13.251.047.000,- Rp.13.251.047.000,-	
Program/Kegiatan: 2. Penguatan Kelembagaan DPR RI Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan DPR RI		Rp.71.118.447.000,- Rp.71.118.447.000,-	
NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kebijakan Pemerintah	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan oleh Tim DPR RI.	2 Rekomendasi
2.	Keputusan Pimpinan DPR RI	Jumlah Putusan Pimpinan DPR RI.	40 Keputusan

Tabel 5

Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2020 Satker Setjen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SATKER SETJEN			
1.	Tersedianya Dokumen Materi Persidangan Pimpinan	1. Persentase skenario, laporan singkat/ke-simpulan, tindaklanjut hasil persidangan Badan Musyawarah	100%

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		yang dimanfaatkan oleh DPR RI.	
		2. Persentase skenario, laporan singkat/kesimpulan, tindaklanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan yang dimanfaatkan oleh DPR RI.	100%
		3. Persentase dukungan rapat koordinasi Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI yang sesuai standar.	100%
		4. Persentase dukungan administrasi SK, assessment dan orientasi Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota, dan PPNASN yang standar.	100%
		5. Indeks Kepuasan Pimpinan DPR RI atas layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan.	3,20
		6. Persentase penyerapan anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan.	90%

Tabel 6
Anggaran Satker Setjen

SATKER/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Satker: Setjen	Rp.4.940.050.000,-
Program: Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	Rp. 4.940.050.000,-
Kegiatan: Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan	Rp. 4.940.050.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

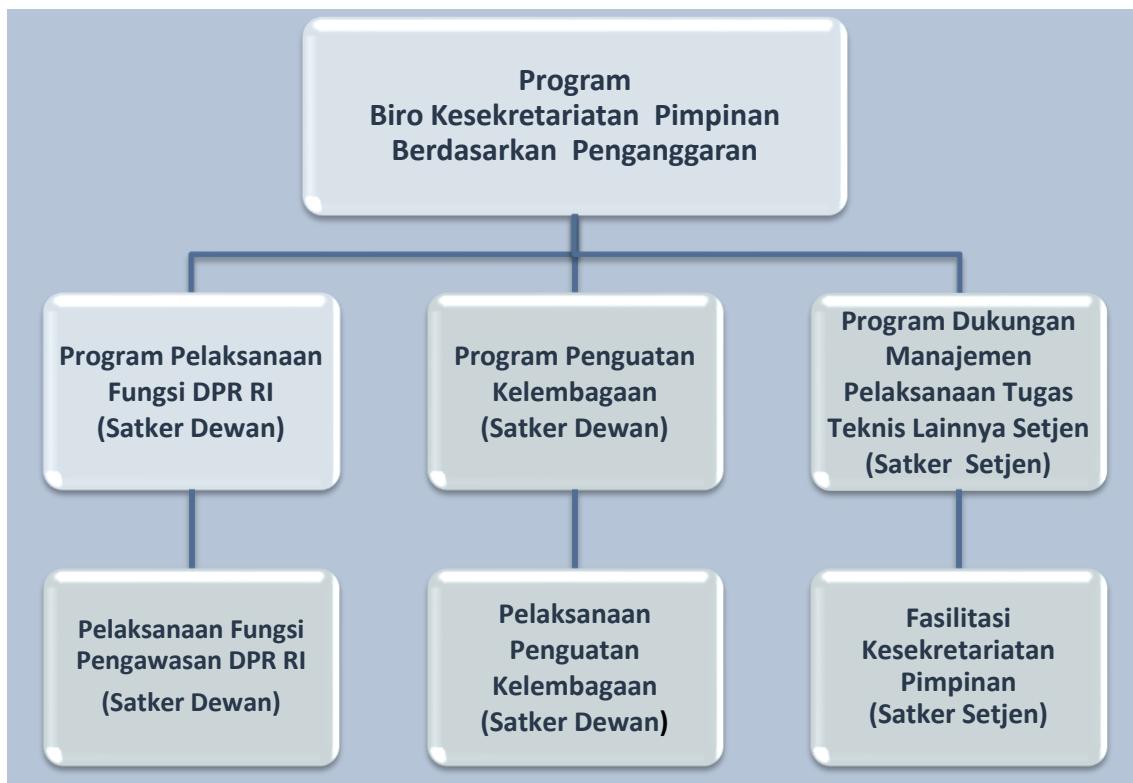
A. PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan tahun 2020 adalah bentuk evaluasi kinerja yang dilakukan selama satu tahun anggaran. Pelaporan kinerja akan mengungkapkan capaian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, tentunya Penetapan Kinerja tahun 2020 menjadi acuan pengukuran capaian kinerja dimaksud.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan beberapa cara pengukuran, di antaranya yaitu: (a) Pembandingan dengan tingkat kinerja yang direncanakan;(b) Pembandingan dengan tingkat kinerja yang lalu; (c) Pembandingan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam satu periode jangka menengah; (d) Pembandingan dengan unit organisasi sejenis. Di dalam pengukuran kinerja ini, Penetapan Kinerja pada awal tahun 2020 menjadi acuan pengukuran, atau dengan kata lain pengukuran yang dilakukan dengan cara membandingkan dengan tingkat kinerja yang direncanakan. Cara pengukuran lain sulit dilakukan karena beberapa hal seperti adanya indikator kinerja yang berubah-ubah dan unit organisasi sejenis hanya ada di parlemen lain.

Pada tahun 2020 Biro Kesekretariatan Pimpinan melaksanakan 3 (tiga) program kegiatan berdasarkan satuan kerja (Satker) penganggaran, yaitu:

Gambar 7
Program Berdasarkan Satuan Kerja (Satker)



Berdasarkan program tersebut, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagai indikator keberhasilan untuk mencapai kinerja yang ingin diraih sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2020. Adapun capaian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan pada Tahun 2020 seperti tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 7
Capaian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2020

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
SATKER DEWAN					
1.	Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kebijakan Pemerintah	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan oleh Tim DPR RI.	2 Rekomendasi	4 Rekomendasi	200%

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
2.	Keputusan Pimpinan DPR RI	Jumlah Putusan Pimpinan DPR RI.	40 Keputusan	64 Keputusan	160%
SATKER SETJEN					
1.	Tersedianya Dokumen Materi Persidangan Pimpinan	1. Persentase ske-nario, laporan singkat/kesimpulan, tindak-lanjut hasil per-sidangan Badan Musyawarah yang dimanfaat-kan oleh DPR RI.	100%	100%	100%
		2. Persentase ske-nario, laporan singkat/kesimpulan, tindak-lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan yang dimanfaatkan oleh DPR RI.	100%	100%	100%
		3. Persentase dukungan rapat koordinasi Pimpinan Sekreta-riat Jenderal DPR RI yang sesuai standar.	100%	100%	100%
		4. Persentase dukungan administrasi SK, assessment	100%	100%	100%

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
		dan orientasi Tena-ga Ahli, Staf Administrasi Anggota, dan PPNASN yang standar.			
		5. Indeks Kepuas-an Pimpinan DPR RI atas layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan.	3,20	3,20	100%
		6. Persentase pe-nyerapan ang-garan Biro Ke-sekretariatan Pimpinan.	90%	74,64%	82,93%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan tahun 2020 sebagaimana tabel di atas diperoleh dengan mengukur capaian indikator-indikator kinerja pada setiap sasaran/program kegiatan. Hal ini dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

SASARAN/PROGRAM KEGIATAN 1

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

INDIKATOR KINERJA	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan oleh Tim DPR RI
1.1	TARGET 2 Rekomendasi
	CAPAIAN 4 Rekomendasi

Indikator Kinerja *Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan oleh Tim DPR RI* berada pada Sasaran Program Kegiatan Biro Kesekretariatan Pimpinan, yaitu termasuk di dalam Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan UU dan Kebijakan Pemerintah, yang dilanjutkan melalui unit-unit kerja di bawahnya. Sasaran program ini termasuk dalam dukungan Program Penguatan Kelembagaan DPR RI melalui Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI dan Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan DPR RI, dengan melakukan dukungan terdapat kegiatan Tim DPR RI.

Dalam tahun 2020, Tim DPR RI yang dibentuk dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang langsung dipimpin oleh Pimpinan DPR RI yaitu:

- a. Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pelaksanaan UU No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DI Yogyakarta, dan Pelaksanaan UU No.28 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan DPR RI No.2/DPR RI/II/2019-2020;
- b. Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan, berdasarkan Keputusan DPR RI No.5/DPR RI/II/2019-2020;
- c. Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 6/DPR RI/II/2019-2020;
- d. Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/201-2020;
- e. Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 9/DPR RI/II/2019-2020;
- f. Tim Implementasi Reformasi DPR RI, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 10/DPR RI/II/2019-2020;

- g. Tim Penguatan Diplomasi Parlemen DPR RI, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 11/DPR RI/II/2019-2020;
- h. Tim *Open Parliament Indonesia (OPI)* DPR RI, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 12/DPR RI/II/2019-2020;

Tim-tim DPR RI tersebut bekerja dengan dukungan dari unit-unit Bagian di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI.

1. **Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pelaksanaan UU No.21 Tahun 2001 jo UU No.35 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Termasuk Papua Barat, Pelaksanaan UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan D.I. Yogyakarta, dan Pelaksanaan UU No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.**

Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pelaksanaan UU No.21 Tahun 2001 jo UU No.35 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Termasuk Papua Barat, Pelaksanaan UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan D.I. Yogyakarta, dan Pelaksanaan UU No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI selama tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan baik secara teknis, administratif dan keahlian dilakukan agar pelaksanaan tugas Tim tersebut dapat berjalan dengan baik, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8

Capaian Kinerja Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pelaksanaan UU No.21 Tahun 2001 jo UU No.35 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Termasuk Papua Barat, Pelaksanaan UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan D.I. Yogyakarta, dan Pelaksanaan UU No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI

NO.	KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	PROSENTASE
1.	Rapat-rapat/RDPU	5	2	40%
2.	Mengundang Pakar	2	-	-
3.	Kunjungan Kerja	2	2	100%

Kegiatan Tim dalam tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali kegiatan rapat dari 5 (lima) kali rencana kegiatan. Hal tersebut terkendala dari intensitas kegiatan dari anggota Tim Pemantau yang terdiri dari lintas Komisi sehingga mengakibatkan benturan kegiatan anggota dan adanya masa pandemi virus Covid19, sehingga terbatasnya ruang gerak anggota dalam melakukan kegiatan.

Adapun kegiatan mengundang pakar semula direncanakan 2 (dua) kali, pada tahun 2020 ini tidak dapat terealisasi. Sedangkan untuk kunjungan kerja yang direncanakan 2 (dua) kali, dan dapat direalisasikan secara keseluruhan yang meliputi 1 (satu) kali kunjungan kerja ke Provinsi Aceh pada tanggal 22 s.d 24 November 2020, dan 1 (satu) kali ke Provinsi Yogyakarta yaitu pada tanggal 25 s.d 27 November 2020.

Berdasarkan hasil kunjungan kerja Tim Pemantau ke Provinsi Aceh, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yakni:

1. Diperlukan adanya kesinambungan program pemerintah Aceh antara pusat, provinsi hingga ke kabupaten/kota, dan program-program pembangunan daerah dan masyarakat Aceh perlu difokuskan dengan baik.
2. Tentang kekosongan wakil gubernur dan kekosongan wakil kepala pemerintahan kabupaten seperti Wakil Bupati Bireun. Hal ini perlu segera dibicarakan dengan Gubernur Aceh agar tidak mundur dari waktu ketentuan aturan normatif. Pimpinan Tim juga akan berkoordinasi dengan Mendagri terkait kekosongan jabatan tersebut.
3. Kedepannya pemantauan terhadap Otsus Aceh akan melibatkan institusi KPK untuk terlibat melakukan pemantauan, sehingga sejak awal perencanaannya sudah dapat tepat guna dan tepat sasaran serta dapat dievaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Tim Pemantau juga akan melakukan kunjungan kerja dengan fokus peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Aceh beserta pelaksanaan program-program pembangunan yang menggunakan dana otsus di level Kabupaten/Kota.

5. Tim Pemantau Otsus Aceh meminta hasil musrembang yang menjadi *Blue Print* Bappeda agar dievaluasi apakah telah sesuai antara program Pemerintah pusat, provinsi hingga ke kabupaten/kota.

Sedangkan untuk hasil kunjungan kerja Tim Pemantau ke Provinsi D.I. Yogyakarta, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yakni

1. Keistimewaan DIY sudah dilaksanakan oleh DIY dan sudah berjalan dengan baik, hingga ke tingkat desa. Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan keistimewaan DIY.
2. Untuk melaksanakan keistimewaan DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan desa (kalurahan) mendapat BKK dari Gubernur. Pelaksanaan keistimewaan ini telah mendapatkan dukungan regulasi dari DPRD DIY. Masyarakat juga diberikan akses untuk berpartisipasi dalam keistimewaan melalui *Jogja Plan*.
3. Hingga saat ini belum ada *grand design* keistimewaan DIY secara holistik dan komprehensif. *Grand design* tersebut baru akan disusun di tahun 2021, yang prosesnya bersamaan dengan momentum sewindu Keistimewaan DIY.

2. Tim Implementasi Reformasi DPR RI

Tim Implementasi Reformasi DPR RI selama tahun 2020 telah melaksanakan tugas tim melalui rapat-rapat, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 9
Capaian Kinerja Tim Implementasi Reformasi DPR RI

NO	KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	PROSENTASE
1.	Rapat-rapat/RDPU	5	1	20%
2.	Mengundang Pakar	6	-	-

Untuk kegiatan Tim Implementasi Reformasi DPR RI ini pada tahun 2020 hanya terdapat 1 (satu) kali rapat dan tidak terdapat kegiatan untuk mengundang pakar/narasumber. Hal tersebut terkendala dari intensitas kegiatan dari anggota Tim yang terdiri dari lintas Komisi sehingga mengakibatkan benturan kegiatan

anggota dan adanya masa pandemi virus Covid19, sehingga terbatasnya ruang gerak anggota dalam melakukan kegiatan.

3. Tim Open Parliament Indonesia (OPI)

Tim Open Parliament Indonesia DPR RI selama tahun 2020 telah melaksanakan tugas tim melalui rapat-rapat, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 10
Capaian Kinerja Tim *Open Parliament Indonesia*

NO	KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	PROSENTASE
1.	Rapat-rapat/RDPU	5	1	20%
2.	Mengundang Pakar	6	-	-

Adapun pada Tahun 2020, hanya terdapat realisasi kegiatan rapat sebanyak 1 (satu) kali dan tidak terdapat kegiatan untuk mengundang pakar/narasumber. Hal tersebut terkendala dari intensitas kegiatan dari anggota Tim yang terdiri dari lintas Komisi sehingga mengakibatkan benturan kegiatan anggota dan adanya masa pandemi virus Covid19, sehingga terbatasnya ruang gerak anggota dalam melakukan kegiatan.

4. Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia selama tahun 2020 telah melaksanakan tugas tim melalui rapat-rapat dan kunjungan kerja dalam negeri, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 11
Capaian Kinerja Tim Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia DPR RI

NO	KEGIATAN	RENCANA	REALISASI
1.	Rapat	7	5
2.	Mengundang Pakar	8	5

4.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri	7	5
5.	Kunjungan Kerja Luar Negeri	-	-
6.	Kegiatan Konsinyering	3	1

SASARAN/PROGRAM KEGIATAN 2

KEPUTUSAN PIMPINAN DPR RI

INDIKATOR KINERJA	Jumlah Putusan Pimpinan DPR RI
2.1	TARGET 40 Putusan
	CAPAIAN 64 Keputusan

Indikator kinerja *Jumlah Keputusan Pimpinan DPR RI* ini terpenuhi melalui diselenggarakannya kegiatan rapat-rapat Pimpinan DPR RI secara kolektif kolegial yaitu rapat-rapat pimpinan, rapat-rapat konsultasi, rapat-rapat Bamus/konsultasi pengganti rapat Bamus. Selain itu, dalam indikator ini juga akan diungkapkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR RI, serta tugas-tugas Pimpinan lainnya yaitu penyusunan Laporan Kinerja DPR dalam 1 tahun sidang.

Indikator kinerja ini tercapai melalui pelaksanaan kegiatan rapat-rapat di Pimpinan DPR RI yang diselenggarakan oleh Bagian Sekretariat Badan Musyawarah (Bamus) dan Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan (Muspim). Dalam mencapai kinerja tersebut, kedua bagian tersebut melakukan dukungan langsung terhadap kegiatan-kegiatan rapat-rapat Pimpinan DPR RI dimaksud, dan berkoordinasi dengan bagian-bagian lain seperti Bagian Set Ketua, dan Bagian Set. Wakil-wakil Ketua yang melakukan dukungan langsung terhadap masing-masing Pimpinan DPR RI.

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020, Badan Musyawarah melakukan Rapat Bamus/ Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus sebanyak 17 kali rapat. Adapun Bagian Musyawarah Pimpinan telah melaksanakan dukungan penyelenggaraan Rapat Pimpinan, serta Rapat/Pertemuan Konsultasi dan Koordinasi, berjumlah 47 kali rapat.

Tabel 12
Capaian Pelaksanaan Rapat di lingkungan Pimpinan

NO	JENIS RAPAT	JUMLAH
1.	Rapat Pimpinan	18
2.	Rapat Koordinasi	6
3.	Rapat Konsultasi Pimpinan dengan Pimpinan AKD	5
4.	Pertemuan Konsultasi	18
5.	Rapat Bamus/Pengganti Rapat Bamus	17
		64

Di samping dukungan pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan kolektif kolegial yang dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan, secara pokok juga melekat melalui unit kerja Sekretariat Ketua dan Wakil-wakil Ketua, dan Sekretariat Bamus, Biro Kesekretariatan Pimpinan juga telah melakukan dukungan terhadap tugas-tugas Pimpinan lainnya. Hal ini terkait dengan penyusunan Pidato Pimpinan DPR RI dan Laporan Kinerja DPR RI.

Dalam penyusunan Pidato Pimpinan, Biro Kesekretariatan telah menghasilkan pidato-pidato pembukaan dan penutupan masa persidangan dan masa sidang, ditambah pidato HUT DPR, yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Sedangkan penyusunan Laporan Kinerja DPR dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 32 ayat (1) huruf k, bahwa salah satu tugas Pimpinan DPR RI menyampaikan laporan kinerja dalam Rapat Paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu. Adapun output yang dihasilkan adalah Buku Ringkasan (*Executive Summary*) dan Buku Lengkap Laporan Kinerja DPR RI.

SASARAN/PROGRAM KEGIATAN 3

TERSEDIANYA DOKUMEN MATERI PERSIDANGAN PIMPINAN

Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI yang dilakukan Biro Kesekretariatan Pimpinan selama tahun 2020 berupa Sasaran/Program Kegiatan Tersedianya Dokumen Materi Persidangan Pimpinan dengan 6 Indikator Kinerja, yaitu:

Tabel 13

Indikator Kinerja Sasaran/Program Kegiatan Tersedianya Dokumen Materi Persidangan Pimpinan

INDIKATOR	TARGET
1. Persentase skenario, laporan singkat/kesimpulan, tindaklanjut hasil persidangan Badan Musyawarah yang dimanfaatkan oleh DPR RI.	100%
2. Persentase skenario, laporan singkat/kesimpulan, tindaklanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan yang dimanfaatkan oleh DPR RI.	100%
3. Persentase dukungan rapat koordinasi Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI yang sesuai standar.	100%
4. Persentase dukungan administrasi SK, assessment dan orientasi Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota, dan PPNASN yang standar.	100%
5. Indeks Kepuasan Pimpinan DPR RI atas layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan.	3,20
6. Persentase penyerapan anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan.	90%

INDIKATOR KINERJA	Persentase skenario, laporan singkat/kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Badan Musyawarah yang dimanfaatkan oleh DPR RI.
TARGET	100%
CAPAIAN	100%

Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan berupa “Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Badan Musyawarah yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” dilihat berdasarkan dukungan kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Sekretariat Bamus yang menyusun dokumen-dokumen rapat berupa skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Badan Musyawarah dalam satu tahun. Adapun dalam satu tahun terdapat 5 masa persidangan. Pengukuran yang dilakukan adalah dalam satu masa persidangan terdapat dokumen persidangan Badan Musyawarah yang ditargetkan sebesar 20% pada masing-masing masa persidangan, yang terdiri dari skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Badan Musyawarah. Kriteria “dimanfaatkan DPR” adalah saat skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan diterima oleh Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan.

NO	DOKUMEN PERSIDANGAN BAMUS	TARGET	CAPAIAN	%
1.	Masa Persidangan III	20%	20%	100%
2.	Masa Persidangan IV	20%	20%	100%
3.	Masa Persidangan V	20%	20%	100%
4.	Masa Persidangan I	20%	20%	100%
5.	Masa Persidangan II	20%	20%	100%
CAPAIAN KINERJA			100%	

Tabel 14
Capaian Kinerja Rapat-rapat Badan Musyawarah

NO	KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	%
1.	Rapat Bamus/Pengganti Rapat Bamus	20	17	85%
2.	Penerbitan SK Pimpinan, SK Dewan dan SK Sekjen	220	209	95%

INDIKATOR KINERJA	Persentase skenario, laporan singkat/kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan yang dimanfaatkan oleh DPR RI.
	TARGET 100%
	CAPAIAN 100%

Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan berupa “Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” dilihat berdasarkan dukungan kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Musyawarah Pimpinan yang menyusun dokumen-dokumen rapat berupa skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan rapat-rapat pimpinan, rapa-rapat koordinasi, dan rapat-rapat konsultasi pimpinan dalam satu tahun. Adapun dalam satu tahun terdapat 5 masa persidangan.

Sebagaimana indikator kinerja sebelumnya, pengukuran yang dilakukan adalah dokumen-dokumen persidangan musyawarah pimpinan yang ditargetkan sebesar 20% pada masing-masing masa persidangan, yang terdiri dari skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan. Kriteria “dimanfaatkan DPR” adalah saat skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan diterima oleh Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan.

NO	DOKUMEN PERSIDANGAN MUSYAWARAH PIMPINAN	TARGET	CAPAIAN	%
1.	Masa Persidangan III	20%	20%	100%
2.	Masa Persidangan IV	20%	20%	100%
3.	Masa Persidangan V	20%	20%	100%
4.	Masa Persidangan I	20%	20%	100%
5.	Masa Persidangan II	20%	20%	100%
CAPAIAN KINERJA			100%	

Tabel 15
Capaian Kinerja Rapat-rapat Musyawarah Pimpinan

NO	JENIS	RENCANA	REALISASI	%
1.	Rapat Pimpinan	10	18	180%
2.	Rapat Koordinasi	10	6	60%
3.	Rapat Konsultasi Pimpinan dengan Pimpinan AKD	10	5	50%
4.	Pertemuan Konsultasi	10	18	180%

INDIKATOR KINERJA	Persentase dukungan rapat koordinasi Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI yang sesuai standar
	TARGET 100%
	CAPAIAN 100%

Rincian kegiatan yang dilaksanakan Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal selama tahun 2020, yakni sebanyak 5 Materi Laporan Pimpinan Sekretariat Jenderal yang disusun berdasarkan masa persidangan.

Materi Persidangan Yang Dihasilkan Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal

NO	DOKUMEN PERSIDANGAN TU PIMPINAN SETJEN	TARGET	CAPAIAN	%
1.	Masa Persidangan III	20%	20%	100%
2.	Masa Persidangan IV	20%	20%	100%
3.	Masa Persidangan V	20%	20%	100%
4.	Masa Persidangan I	20%	20%	100%
5.	Masa Persidangan II	20%	20%	100%
CAPAIAN KINERJA			100%	

Kelima dokumen Laporan Kegiatan Bagian TU Pimpinan Setjen selama tahun 2020 tersebut dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal, Deputi Bidang

Persidangan, dan Deputi Bidang Administrasi. Dokumen laporan dimaksud di antaranya berisikan tentang dokumen-dokumen rapat, dan pertanggungjawaban pelaksanaan rapat dan kegiatan dimaksud.

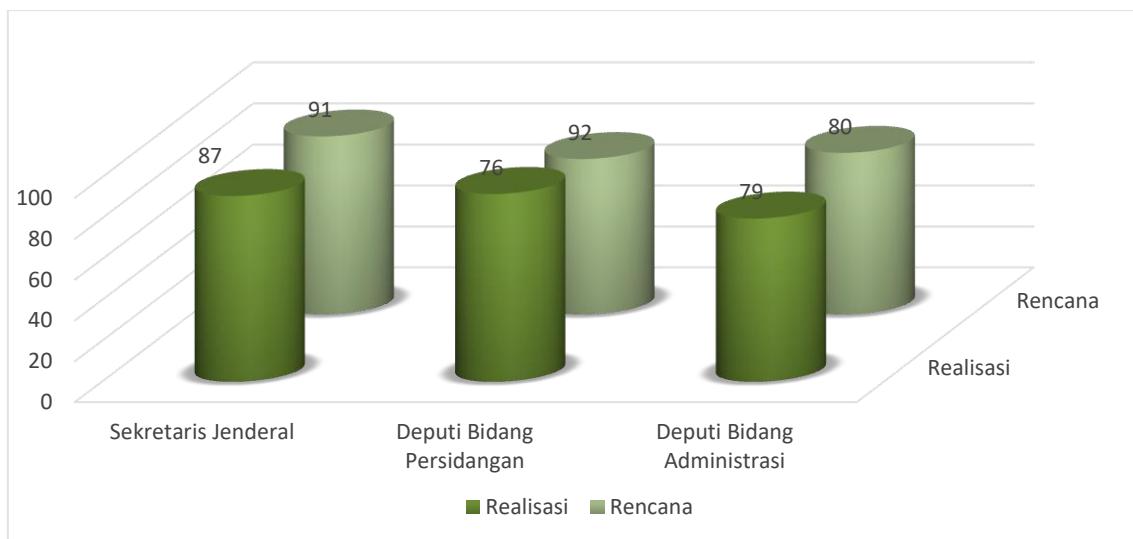
Dukungan kegiatan yang dilakukan Biro Kesekretariatan Pimpinan tidak hanya kepada Pimpinan DPR RI, tetapi juga kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Deputi Bidang Persidangan, dan Deputi Bidang Administrasi. Ini terlihat dari kegiatan yang dilaksanakan yaitu dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan Setjen DPR RI berupa penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi (rakor) persiapan dan tindak lanjut rapat pimpinan, rakor persiapan dan tindak lanjut rapat BURT, rakor Pimpinan Setjen. Sedangkan di Deputi-deputi dilaksanakan rakor rencana kerja, rakor monitoring kinerja, rakor evaluasi kinerja, dan rakor khusus penanganan hal-hal tertentu.

Dukungan terhadap kegiatan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI tidak hanya terkait dengan rapat-rapat, juga terkait dengan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pimpinan Setjen DPR, yang mencakup pengaturan tamu-tamu, dan perjalanan dinas Pimpinan Setjen. Untuk perjalanan dinas Sekretaris Jenderal sebanyak 2 kali perjalanan dinas, dan perjalanan dinas Deputi Bidang Administrasi sebanyak 1 kali. Keseluruhan kegiatan tersebut diikuti dengan dukungan kegiatan administrasi.

Tabel 16
Capaian Kinerja Kegiatan Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal

NO	JENIS	RENCANA	REALISASI	%
1.	Rapat/Pertemuan Sekretaris Jenderal	91	87	95,6
2.	Rapat/Pertemuan Deputi Bidang Persidangan	92	76	82,6
3.	Rapat/Pertemuan Deputi Bidang Administrasi	80	79	99,99

Gambar 8
Capaian Kinerja Kegiatan Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal



INDIKATOR KINERJA	Percentase Dukungan Administrasi SK, assesmeent dan orientasi Tenaga Ahli, Staf Administrasi dan PPNASN yang sesuai standar
3.11	TARGET 100%
	CAPAIAN 100%

Rincian kegiatan yang dilaksanakan Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli, dan Staf Administrasi Anggota DPR selama tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Kegiatan Bagian TU Tenaga Ahli

NO	KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	%
1.	Kegiatan Rapat-Rapat	30	10	33.3%
2.	Kegiatan Assesmen Tenaga Ahli AKD dan Fraksi	1	2	200%
3.	Penerbitan SK TA dan Asisten Anggota	1.200	1.070	89.16%
4.	Orientasi/Pembekalan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi	8	10	125%

	Anggota			
--	---------	--	--	--

INDIKATOR KINERJA	Jumlah Dokumen Administrasi Tenaga Ahli, Staf Administrasi dan Pegawai Tidak Tetap
3.11	TARGET 2 Dokumen
CAPAIAN 2 Dokumen	

Rincian kegiatan yang dilaksanakan Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli, dan Staf Administrasi Anggota DPR selama tahun 2020, yakni sebanyak 2 Dokumen Laporan Administrasi Tenaga Ahli dan Staf Administrasi serta Laporan Administrasi Pegawai Tidak Tetap sebagai berikut:

Tabel 18
Laporan Administrasi Tenaga Ahli, Staf Administrasi, dan
Laporan Administrasi Pegawai Tidak Tetap

NO	JENIS DOKUMEN	KEGIATAN	JUMLAH DOKUMEN
1.	Laporan Administrasi Tenaga Ahli dan Staf Administrasi	1	1
2.	Laporan administrasi Pegawai Tidak Tetap	1	1
Jumlah Dokumen Administrasi Tenaga Ahli, Staf Administrasi, dan Pegawai Tidak Tetap		2	

Dari 2 (dua) Dokumen Administrasi Tenaga Ahli, Staf Administrasi, dan Pegawai Tidak Tetap selama tahun 2021 tersebut dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR. Dokumen dimaksud berupa hasil kegiatan rapat-rapat dan penerbitan Surat Keputusan.

Untuk penanganan Pegawai Tidak Tetap secara teknis dikelola oleh biro dan PPK masing-masing, dan Bagian TU TA dan SAA hanya menerima jumlah

keseluruhan PTT yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Bagian Kepegawaian

Adapun Capaian Kegiatan yang dilaksanakan Bagian Tata Usaha Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR sebagai berikut:

Tabel 19
Capaian kegiatan yang dilaksanakan
Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR

NO	KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	%
1.	Rapat-rapat	24	67	279
2.	Assesmen	1	2	200
3.	Orientasi TA dan SAA	8	7	87,5
4.	Penerbitan SK Penetapan TA dan Staf Administrasi Anggota	600	840	140
5.	Penerbitan SK Pemberhentian TA dan Staf Administrasi Anggota	420	480	144,3

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bagian TU TA dan SAA telah menggunakan Aplikasi ppnppn.dpr.go.id untuk pendaftaran Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI secara *online* yang merupakan *Quick Wins* Pengembangan Aplikasi SITANANG, yang prosesnya dari tahun 2020 dikelola langsung Bagian TU Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota saat ini berjalan dengan lancar. Ada pun dukungan anggaran di Bagian TU TA dan SAA adalah Rp. Rp. 1.036.181.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.024.070.690 atau 98,8%.

INDIKATOR KINERJA	Indeks Kepuasan Pimpinan DPR RI atas layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan
	TARGET 3,20
	CAPAIAN 3,13

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasaan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei berkala minimal 1(satu) kali setahun. Berdasarkan Permenpan tersebut, Biro Kesekretariatan Pimpinan melakukan survei kepada pengguna (*user*), yaitu Pimpinan DPR RI dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan dalam Permenpan tersebut. Survei dilakukan sebagai salah satu bentuk hasil evaluasi atas kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan DPR RI.

Pengolahan data survei Kepuasaan Pimpinan DPR RI atas Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan survei berdasarkan unsur Survei Kepuasaan Masyarakat yang disesuaikan dengan bentuk dan jenis layanan yang diselenggarakan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan. Adapun jenis layanan yang dilakukan pengukuran yaitu:

- a. Layanan Persidangan;
- b. Layanan Keahlian;
- c. Layanan Administrasi Keuangan; dan
- d. Layanan Administrasi Perjalanan Dinas.

Adapun unsur yang menjadi penilaian Biro Kesekretariatan Pimpinan, yaitu:

1. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.
2. Waktu Penyelesaian.
3. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.
4. Kompetensi dan Perilaku SDM.
5. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.
6. Sarana dan Prasarana.

Hasil survei Kepuasaan Pimpinan DPR RI atas Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 20

Nilai Indeks Kepuasan Pimpinan DPR RI atas Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan

NO	UNSUR SURVEI KEPUASAN	NILAI INDEKS KEPUASAN
----	-----------------------	-----------------------

1.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,20
2.	Waktu Penyelesaian	3,15
3.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,25
4.	Kompetensi dan Perilaku SDM	3,30
5.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	2,80
6.	Sarana dan Prasarana	2,40
Indeks Komposit		3,13

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil survei Kepuasaan Pimpinan DPR RI atas Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan memperoleh skors 3,13 dengan nilai interval konversi 78,5 dan masuk dalam kategori baik dengan mutu pelayanan “B”.

Hasil survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan hasil survei yang sama pada tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan indikator Kepuasan Pimpinan DPR RI atas Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan merupakan hal baru yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Di samping kegiatan Pimpinan yang dilakukan secara kolektif dan kolegial, Pimpinan DPR RI juga melakukan kegiatan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Hal ini pada akhirnya akan menunjang dan mendukung bagaimana Pimpinan dapat menghasilkan keputusan.

Untuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR pada dasarnya menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang dialami saat ini. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Kegiatan Pimpinan DPR RI dilakukan dengan dukungan dari Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI sebagai bagian dari sistem pendukung Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tabel 21
Capaian Kegiatan Pelaksanaan Tugas Ketua DPR RI

NO.	PIMPINAN DPR	TAMU/DELEGASI DALAM DAN LUAR NEGERI	RAKOR PIMPINAN	KUNKER DALAM NEGERI	KUNKER LUAR NEGERI
1.	Ketua DPR RI	5	20	10	-

2.	Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam	96	-	123	3
3.	Wakil Ketua DPR RI/Korekku	776	3	54	-
4.	Wakil Ketua DPR RI/Korinbang	96	3	130	-
5.	Wakil Ketua DPR RI/Korkesra	26	3	97	-

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Luar Negeri Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam pada tahun 2020, sebagai berikut:

1. Mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VIII dalam rangka Penyusunan Biaya Haji Tahun 2020 ke Mekkah dan Madinah (27 Januari 2020);
2. Kunjungan Muhibah ke Ukraina (30 Oktober s.d. 5 November 2020);
3. Kunjungan Muhibah ke Amerika (22 s.d. 28 Desember 2020).



Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dukungan anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan pada tahun 2020 meliputi dua Satuan Kerja (Satker) yaitu (1) Satker Dewan dan (2) Satker Setjen. Dalam pelaksanaan tugasnya Biro Set Pimpinan memiliki 3 (tiga) program kegiatan berdasarkan satuan kerja (Satker) penganggaran, yaitu: (1) Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI (Satker Dewan); (2) Program Penguatan Kelembagaan (Satker Dewan); dan (3) Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen (Satker Setjen)

Berdasarkan 3 (tiga) program tersebut, kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagai indikator-indikator keberhasilan untuk mencapai kinerja yang ingin diraih sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2020. Dari ketiga program tersebut,

diturunkan ke dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, pelaksanaan penguatan kelembagaan, dan fasilitasi kesekretariatan pimpinan.

Dalam melihat capaian terhadap indikator kinerja *Presentase penyerapan anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan*, maka harus dilihat pada dua Satker tersebut. Dari kedua Satker tersebut, akan terlihat perbandingan antara pagu anggaran yang dialokasikan dan realisasi penyerapan anggaran yang dilakukan selama tahun 2020.

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	%
1.	Satker Dewan	Rp.73.854.875.000,-	Rp.54.371.351.429,-	73,62%
2.	Satker Setjen	Rp.3.802.659.000,-	Rp.3.625.415.990,-	95,34%
		Rp.77.657.534.000,-	Rp.57.996.767.419,-	74,64%

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pengukuran yang mengacu pada indikator-indikator kinerja sebagaimana telah disampaikan, maka akuntabilitas kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan pada tahun 2020 dapat dilakukan analisis terhadap capaian kinerjanya. Biro Kesekretariatan Pimpinan telah melakukan revisi kegiatan dan anggaran untuk mengakomodasi kegiatan yang dilakukan Pimpinan DPR. Dengan demikian, kinerja yang disajikan adalah perbandingan antara realisasi dengan rencana kegiatan yang telah direvisi.

Mengingat tugas pokok dan fungsi Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagai sistem pendukung kegiatan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI maka penggunaan anggaran tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa perubahan alokasi anggaran pada tahun 2020 dimaksudkan untuk mengadaptasi kegiatan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam tahun 2020, utamanya dalam melakukan penyesuaian kondisi terhadap pandemi Covid-19.

Tabel 22
Perubahan Alokasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2020 dan
realisasinya

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Pagu Awal) Rp.	ANGGARAN (revisi akhir) Rp.	Realisasi Rp.
SATKER DEWAN				

Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI:				
1. ♦ Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI	13.251.047.000	16.990.163.000	5.056.930.426	
Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	83.582.924.000	73.854.712.000	48.908.380.503	
SATKER SETJEN				
Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
1. Sekretariat Jenderal DPR RI	7.437.860.000	3.802.659.000	3.643.095.990	
♦ Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan				

Tabel 23

Capaian Realisasi Anggaran Program Penguatan Kelembagaan DPR RI (Satker Dewan)

NO	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2019		ALOKASI ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2020	
		ANGGARAN	%		ANGGARAN	%
Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan DPR RI						
1.	Pelaksanaan Tugas Ketua DPR RI					
	Rp. 20.610.890.000	Rp. 15.768.561.826	76,51	Rp. 9.867.648.000	Rp. 6.626.933.709	67,16
2.	Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan					
	Rp. 17.876.107.000	Rp. 17.346.085.350	97,04	Rp. 14.835.584.00	Rp. 14.674.032.310	98,91
3.	Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan					
	Rp. 21.094.610.000	Rp. 20.669.279.100	97,98	Rp. 10.593.223.000	Rp. 9.787.896.425	92,40

4.	Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan					
	Rp. 4.500.601.000	Rp. 966.542.600	21,48	Rp. 8.493.129.000	Rp. 6.982.784.500	82,22
5.	Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat					
	Rp. 21.370.384.000	Rp. 20.685.027.541	96,79	Rp. 10.192.561.000	Rp. 9.001.487.159	88,31
6.	Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI Bidang Hubungan Antar Lembaga					
	Rp. 11.756.181.000	Rp. 11.755.208.360	99,99	-	-	-
7.	Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah					
	Rp. 1.551.500.000	Rp. 826.075.000	53,24	Rp. 576.500.000	Rp. 531.765.000	92,24
8.	Pelaksanaan Tugas Musyawarah Pimpinan					
	Rp. 1.930.800.000	Rp. 1.689.869.700	87,52	Rp. 630.800.000	Rp. 562.246.900	89,13
9.	Pelaksanaan Tugas Pimpinan Lainnya					
	Rp. 3.288.967.000	Rp. 2.102.158.500	63,92	Rp. 1.675.276.000	Rp. 1.135.844.600	67,80
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI						
1.	Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua					
	Rp. 3.655.508.000	960.194.400	26,27	Rp. 2.476.551.000	Rp. 1.456.073.050	58,79
2.	Tim Penguatan Diplomasi Parlemen					
	Rp. 209.370.000	Rp. 0	0	Rp. 296.760.000	77.600.000	26,15
3.	Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)					
	Rp. 185.840.000	Rp. 0	0	296.760.000	Rp. 0	0
4.	Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan					
	Rp. 2.180.595.000	Rp. 0	0	Rp. 2.213.344.000	Rp. 1.252.494.376	56,59
5.	Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia					
	Rp. 5.823.727.000	Rp. 4.387.281.300	75,33	4.262.565.000	1.138.362.000	26,71
6.	Tim Implementasi Reformasi DPR RI					

	Rp. 6.481.443.000	Rp. 5.724.717.000	88,32	Rp. 438.480.000	Rp. 118.600.000	27,05
7.	Tim Pengawasan Pemulihan Ekonomi Nasional					
	-	-	-	Rp. 1.376.366.000	0	0
8.	Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana					
	Rp. 2.430.177.000	Rp. 1.622.974.000	66,78	2.915.477.000	Rp. 818.633.000	28,08
9	Tim Pengawas Penegakan Hukum					
	-	-	-	Rp. 1.376.366.000	0	0
10	Tim Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji					
	Rp. 8.935.570.000	Rp. 7.030.508.400	78,68	-	-	-

Dukungan anggaran terhadap kegiatan kedewanan merupakan hal yang harus mutlak ada. Pengalokasian anggaran di Biro Kesekretariatan Pimpinan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Pimpinan DPR dan Pimpinan Setjen DPR RI. Pada tahun 2020, terdapat perubahan dimana Wakil Ketua DPR RI Koordinator hubungan antar lembaga dihapuskan, dengan demikian anggarannya tidak tersedia. Sebaliknya, terdapat beberapa tim anggarannya tersedia, namun tim tersebut tidak efektif dan tidak melakukan kegiatan sehingga tidak ada anggaran yang terserap.

Tabel 24
Capaian Realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lainnya
Sekretariat Jenderal DPR RI (Satker Setjen)

NO	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2019		ALOKASI ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2020		
		ANGGARAN	%		ANGGARAN	%	
Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan							
1.	Perumusan Bahan Kebijakan Biro Kesekretariatan Pimpinan						
	1.167.987.000	1.000.477.200	86	1.272.916.000	1.232.222.900	96,80	
2.	Fasilitas Persidangan Ketua						
	91.080.000	66.240.000	73	0	0		

3.	Fasilitas Persidangan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan					
	37.400.000	3.400.000	9	0	0	
4.	Fasilitas Persidangan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan					
	84.151.000	40.690.000	48	8.280.000	3.450.000	41,6 7
5.	Fasilitas Persidangan Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan					
	20.360.000	20.000.000	98	0	0	
6.	Fasilitas Persidangan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat					
	8.842.000	4.140.000	98	0	0	
7.	Fasilitas Persidangan Badan Musyawarah					
	350.556.000	325.620.000	93	100.260.000	93.562.000	93,3 2
8.	Fasilitas Persidangan Musyawarah Pimpinan					
	308.610.000	273.290.000	89	53.462.000	35.964.087	67,2 7
9.	Perumusan Bahan Kebijakan Pimpinan Sekretariat Jenderal					
	4.202.156.000	3.632.578.632	86	1.331.560.000	1.236.146.400	92,8 3
10.	Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR					
	1.567.298.000	1.488.870.875	95	1.036.181.000	1.024.070.690	98,8 3

DIPA merupakan hasil transformasi dari dokumen perencanaan anggaran yang dibuat oleh Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu, kualitas DIPA berkaitan erat dengan perencanaan anggaran. Penyerapan anggaran berbasis kinerja sudah seharusnya berpegang pada tiga prinsip, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Prinsip ekonomis berarti memperhatikan kepastian penggunaan input, sedangkan prinsip efisien membandingkan *input* atas *output*, dan prinsip efektif, yaitu membandingkan *outcome* atas *output*.

Semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat akan memberikan keleluasaan gerak terhadap rencana kerja Pimpinan DPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Artinya, ketersediaan dukungan anggaran merupakan hal yang

harus mutlak ada untuk terlaksananya kegiatan Pimpinan DPR RI. Pengalokasian anggaran di Biro Kesekretariatan Pimpinan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Pimpinan DPR dan Pimpinan Setjen DPR RI. Sebaliknya ketidaktepatan dalam perencanaan atau penyusunan anggaran mengakibatkan perlunya tindakan revisi terhadap DIPA. Revisi DIPA ini akan mempengaruhi penyerapan anggaran karena jadwal kegiatan harus diubah sehingga waktu pelaksanaan menjadi mundur dan akhirnya terjadi sisa anggaran yang tidak sempat lagi digunakan pada akhir tahun.

Oleh sebab itu dengan perencanaan anggaran yang matang akan memastikan tersedianya dana untuk membiayai program/kegiatan Pimpinan Dewan, dan semakin meningkatkan akurasi perencanaan anggaran yang berdampak semakin baik kualitas serapan anggaran yang proporsional. Selain itu, pelaksanaan perencanaan anggaran juga atas arahan dan kebijakan Pimpinan DPR RI.

BAB IV

PENUTUP

Secara garis besar, capaian yang telah diraih oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2020 ini telah cukup optimal dilakukan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan DPR RI. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2020, kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah memperhatikan kondisi yang berkembang ketika itu, yaitu adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2020 telah dapat dilaksanakan secara optimal dengan memperhatikan realitas kondisi dan kebijakan (*policy*) serta arahan Pimpinan DPR RI. Ini berarti bahwa seluruh pelaksanaan kinerja dukungan terhadap kegiatan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, dilaksanakan dengan baik, dilihat dari aspek kualitas (mutu) maupun kuantitas (jumlah) nya. Pencapaian dukungan kinerja tersebut tidak berarti seluruh jenis kegiatan berkaitan langsung (*berbanding lurus atau berkorelasi secara langsung*) dengan tingkat penyerapan realisasi anggaran Tahun 2020.

Beberapa hal yang perlu dikemukakan dari hasil pengukuran indikator kinerja adalah, bahwa pada tahun 2020 terdapat respon yang cepat dan memberi ruang secara fleksibel dalam hal anggaran kepada meningkatnya kegiatan Pimpinan DPR RI di tengah-tengah pandemi. Revisi anggaran yang dilakukan tidak sampai mengganggu kegiatan Pimpinan DPR RI secara signifikan.

Demikian Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk tahun 2020. Akhirnya kami mempunyai harapan agar Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Januari 2021

Karo Set. Pimpinan,

Drs.Djaka Dwiwinarko, M.Si.
NIP. 196507051991031003



LAPORAN KINERJA

BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN

TAHUN

2020